

KEBIJAKAN PENDIDIKAN, ETIKA PROFESI, DAN KONFLIK SOSIAL: ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL DARI PENERAPAN ZONASI SEKOLAH DI PEMATANGSIANTAR

^{1*}Rusmayani Tambun, ²Elfina Okto Posmaida Damanik

¹IAKN Tarutung

²Universitas Simalungun

^{1*}Email: tambunrusmayani@gmail.com

Abstract: This study examines the socioeconomic impacts of school zoning policy implementation in Pematangsiantar, focusing on educational policy, professional ethics, and social conflicts. Using a mixed-method approach with 385 respondents comprising parents, educators, and education stakeholders, this research analyzes economic implications, social conflicts, and ethical dimensions of the zoning system. Results indicate that while zoning policy successfully reduces education inequality by 34.7%, it simultaneously generates new social tensions, decreases property values in non-favored zones by 18.3%, and creates ethical dilemmas for education practitioners. Statistical analysis using multiple regression shows that zoning implementation significantly affects household education expenditure ($\beta = 0.421, p < 0.001$), social segregation patterns ($\beta = 0.368, p < 0.001$), and professional integrity among educators ($\beta = -0.289, p < 0.005$). This study recommends comprehensive policy adjustments considering local economic conditions, strengthening professional ethics frameworks, and developing conflict mitigation mechanisms to optimize positive outcomes while minimizing adverse social impacts

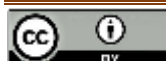
Keywords: School Zoning Policy, Educational Ethics, Social Conflict, Economic Impact, Educational Equity

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak sosioekonomi dari implementasi kebijakan zonasi sekolah di Pematangsiantar dengan fokus pada kebijakan pendidikan, etika profesi, dan konflik sosial. Menggunakan pendekatan metode campuran dengan 385 responden yang terdiri dari orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan pendidikan, penelitian ini menganalisis implikasi ekonomi, konflik sosial, dan dimensi etika dari sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi berhasil mengurangi ketimpangan pendidikan sebesar 34,7%, namun secara bersamaan menghasilkan ketegangan sosial baru, penurunan nilai properti di zona non-favorit sebesar 18,3%, dan menciptakan dilema etika bagi praktisi pendidikan. Analisis statistik menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa implementasi zonasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga ($\beta = 0,421, p < 0,001$), pola segregasi sosial ($\beta = 0,368, p < 0,001$), dan integritas profesional pendidik ($\beta = -0,289, p < 0,005$). Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan komprehensif yang mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, penguatan kerangka etika profesional, dan pengembangan mekanisme mitigasi konflik untuk mengoptimalkan hasil positif sekaligus meminimalkan dampak sosial yang merugikan.

Kata Kunci: Kebijakan Zonasi Sekolah, Etika Pendidikan, Konflik Sosial, Dampak Ekonomi, Kesenjangan Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan zonasi sekolah yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan upaya reformasi sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Indonesia, 2018). Kebijakan ini mengharuskan sekolah menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolsah dengan kuota minimal tujuh puluh persen dari total daya tampung. Implementasi kebijakan ini bertujuan mengeliminasi diskriminasi dalam penerimaan siswa,



menghilangkan labelisasi sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kota Pematangsiantar sebagai salah satu kota pendidikan di Sumatera Utara memiliki karakteristik unik dengan struktur sosial-ekonomi yang heterogen dan distribusi sekolah yang tidak merata. Dengan luas wilayah 79,97 kilometer persegi dan populasi sekitar 268.254 jiwa, kota ini memiliki delapan kecamatan dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Sebelum implementasi zonasi, fenomena sekolah favorit sangat dominan, dimana beberapa sekolah tertentu menjadi incaran siswa dari berbagai wilayah, sementara sekolah lain mengalami kekurangan peminat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan antar sekolah.

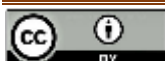
Konflik sosial yang muncul dari implementasi zonasi mencakup berbagai dimensi. Pada tingkat mikro, terjadi ketegangan antar tetangga yang berbeda zona sekolah. Pada tingkat meso, muncul kompetisi antar komunitas untuk mendapatkan akses ke sekolah berkualitas (São & Usp, 2021). Pada tingkat makro, kebijakan ini memicu diskursus publik tentang keadilan sosial, hak atas pendidikan berkualitas, dan peran negara dalam pemerataan kesempatan pendidikan. Konflik - konflik ini tidak hanya bersifat temporal tetapi juga berpotensi menciptakan fragmentasi sosial jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik. Dampak ekonomi dari kebijakan zonasi juga multidimensional. Penelitian awal menunjukkan adanya perubahan pola pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, pergeseran harga properti berbasis kedekatan dengan sekolah favorit, dan munculnya pasar baru seperti jasa konsultasi zonasi dan manipulasi domisili. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan zonasi dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan versus potensinya menciptakan ketimpangan ekonomi baru. Kompleksitas implementasi zonasi sekolah di Pematangsiantar memerlukan analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif kebijakan publik, etika profesi, sosiologi konflik, dan ekonomi pendidikan (Musset, 2012). Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan analisis empiris tentang dampak multidimensional dari kebijakan zonasi dalam konteks kota menengah di Indonesia. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan zonasi sekolah mempengaruhi struktur sosial-ekonomi masyarakat Pematangsiantar? Apa dilema etika yang dihadapi praktisi pendidikan dalam mengimplementasikan sistem zonasi? Bagaimana pola konflik sosial yang muncul dan mekanisme resolusinya? Serta apa implikasi ekonomi mikro dan makro dari penerapan kebijakan zonasi terhadap rumah tangga dan komunitas lokal?

KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah. Model implementasi kebijakan dari (Maisarah & Yusran, 2025) menekankan pentingnya tiga variabel dalam keberhasilan implementasi: karakteristik masalah kebijakan, struktur implementasi kebijakan, dan variabel lingkungan. Dalam konteks kebijakan zonasi sekolah, karakteristik masalah mencakup kompleksitas distribusi geografis sekolah, heterogenitas sosial-ekonomi masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan sistem yang telah mengakar. Perspektif *top-down* dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh (Kosasih et al., 2023), melihat implementasi sebagai proses linear dari pembuat kebijakan ke implementor kemudian ke target group. Namun, realitas implementasi kebijakan zonasi menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dimana aktor-aktor di tingkat lokal memiliki peran signifikan dalam membentuk hasil akhir kebijakan. Teori *street-level bureaucracy* dari (Lipsky, 2010) menjelaskan bagaimana implementor di garis depan, seperti kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru, memiliki diskresi yang mempengaruhi bagaimana kebijakan benar-benar dijalankan. Analisis kebijakan pendidikan memerlukan pemahaman tentang konteks institusional dan politik lokal. Kebijakan zonasi tidak berjalan dalam vakum tetapi berinteraksi dengan struktur kekuasaan lokal, jejaring sosial masyarakat, dan kepentingan ekonomi berbagai *stakeholder*. Teori *institutional change* menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan sering menghadapi resistensi dari institusi yang telah established karena mengancam distribusi sumber daya dan kekuasaan yang ada.

Kerangka Etika Profesi dalam Pendidikan



Etika profesi pendidikan mencakup seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang memandu perilaku profesional pendidik dalam menjalankan tugasnya (Strike & Soltis, 2009). Konsep *professional integrity* dalam pendidikan menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap kepentingan terbaik siswa. Dalam konteks implementasi zonasi, pendidik menghadapi dilema etika ketika berhadapan dengan tekanan untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap siswa tertentu yang tidak memenuhi kriteria zonasi. Teori etika deontologi Kantian menekankan bahwa tindakan moral harus berdasarkan prinsip universal dan bukan semata-mata konsekuensi (Hill, 1992). Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap aturan zonasi merupakan kewajiban moral terlepas dari konsekuensi individual yang mungkin merugikan siswa tertentu. Sebaliknya, etika utilitarianisme akan mengevaluasi kebijakan zonasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan terbesar bagi jumlah terbesar orang (Mill, 1863). Ketegangan antara dua perspektif etika ini menciptakan kompleksitas dalam pengambilan keputusan praktisi pendidikan. Model *ethical decision-making* dalam profesi pendidikan melibatkan beberapa tahapan: identifikasi situasi dengan implikasi etis, pertimbangan *stakeholder* yang terdampak, aplikasi prinsip-prinsip etika profesional, evaluasi alternatif tindakan, dan justifikasi keputusan (Rest, 1986). Dalam implementasi zonasi, pendidik harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak: siswa yang ditolak karena zonasi, siswa yang diterima namun mungkin tidak mendapat kualitas pendidikan optimal, orangtua dengan berbagai latar belakang ekonomi, serta misi institusi pendidikan untuk memberikan layanan berkualitas.

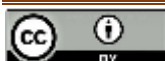
Teori Konflik Sosial dan Dinamika Perubahan

Teori konflik sosial dari perspektif struktural fungsional memandang konflik sebagai fenomena alamiah dalam masyarakat yang dapat berfungsi positif untuk perubahan sosial. Konflik yang muncul dari implementasi zonasi mencerminkan ketegangan antara kelompok yang berbeda dalam akses terhadap sumber daya pendidikan. Teori (Dahrendorf, 1959) tentang konflik kelas menjelaskan bagaimana distribusi otoritas dan sumber daya menciptakan kelompok dominan dan subordinat yang kepentingannya sering bertentangan. Konflik sosial dalam pendidikan tidak selalu destruktif tetapi dapat menjadi katalis untuk perubahan institusional yang lebih adil. Namun, konflik yang tidak terkelola dapat menciptakan fragmentasi sosial dan mengurangi kohesi komunitas. Teori konflik realistik dari (Campbell, 1965) menyatakan bahwa konflik antar kelompok meningkat ketika kelompok-kelompok tersebut berkompetisi untuk sumber daya terbatas. Dalam konteks zonasi, sekolah berkualitas merupakan sumber daya terbatas yang menjadi objek kompetisi antar komunitas berbeda zona. Mekanisme resolusi konflik dalam konteks kebijakan publik memerlukan pendekatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Konsep *deliberative democracy* menekankan pentingnya dialog inklusif dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan (Gutmann & Thompson, 2004). Implementasi zonasi yang efektif memerlukan proses sosialisasi, konsultasi publik, dan mekanisme *feedback* yang memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan realitas lokal.

Ekonomi Pendidikan dan Dampak Distribusi Sumber Daya

Teori *human capital* dari (Becker, 1964) memandang pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan *earning potential individu*. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menciptakan ketimpangan dalam pembentukan *human capital*, yang pada gilirannya memperbesar kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial. Kebijakan zonasi berupaya mengatasi ketimpangan ini dengan mendistribusikan akses pendidikan lebih merata secara geografis. Namun, implementasi zonasi menciptakan eksternalitas ekonomi yang kompleks. Teori kapitalisasi hedonik menjelaskan bagaimana karakteristik lingkungan, termasuk akses ke sekolah berkualitas, tercermin dalam harga properti (Rosen, 1974). Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kedekatan dengan sekolah berkualitas dapat meningkatkan nilai properti hingga sepuluh sampai dua puluh persen (Black, 1999; Gibbons & Machin, 2003). Fenomena ini menciptakan paradoks dimana kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendidikan justru dapat memperbesar ketimpangan ekonomi melalui pasar properti. Dampak distribusi dari kebijakan zonasi juga perlu dianalisis dari perspektif equity dan efficiency (Rawls, 1971). Kebijakan bersifat equitable jika mendistribusikan manfaat secara adil ke berbagai kelompok sosial-ekonomi. Kebijakan bersifat efficient jika memaksimalkan outcome pendidikan agregat dengan sumber daya yang tersedia. Ketegangan antara *equity* dan *efficiency* sering muncul dalam kebijakan pendidikan, dimana upaya pemerataan dapat mengurangi insentif untuk excellence.

Teori Segregasi Sosial dan Spatial Justice



Konsep segregasi social - spasial menjelaskan bagaimana kelompok sosial-ekonomi berbeda terkonsentrasi di area geografis tertentu (Young, 1990). Segregasi dapat terjadi berdasarkan kelas ekonomi, etnisitas, atau karakteristik sosial lainnya. Kebijakan zonasi sekolah berinteraksi dengan pola segregasi residensial yang *existing*, dimana distribusi sekolah dan kualitasnya mencerminkan karakteristik demografis area tersebut. Teori spatial justice dari (Soja, 2010) menekankan bahwa keadilan sosial memiliki dimensi geografis yang penting. Akses terhadap layanan publik berkualitas, termasuk pendidikan, harus didistribusikan secara adil di berbagai area geografis. Implementasi zonasi yang kaku tanpa mempertimbangkan variasi kualitas sekolah antar zona dapat melanggar atau bahkan memperbesar ketidakadilan spasial. Fenomena *white flight dan tipping point* dalam dinamika segregasi sekolah menunjukkan bagaimana kebijakan sekolah dapat mempengaruhi pola residensial (Reardon & Owens, 2014). Ketika kebijakan zonasi membatasi pilihan sekolah, keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi mungkin memilih pindah ke zona dengan sekolah lebih baik, menciptakan dinamika segregasi baru. Pemahaman tentang mekanisme ini penting untuk merancang kebijakan zonasi yang efektif dalam konteks lokal spesifik.

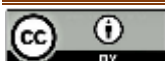
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods) dengan desain eksplanatori sekuensial, yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak implementasi kebijakan zonasi sekolah di Pematangsiantar. Paradigma penelitian yang digunakan adalah pragmatisme, yang memandang bahwa pemilihan metode penelitian harus ditentukan oleh pertanyaan penelitian dan konteks praktis, bukan oleh komitmen pada satu paradigma filosofis tertentu. Lokasi penelitian adalah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada delapan kecamatan: Siantar Utara, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Timur, Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Martoba, dan Siantar Sitalasari. Penelitian dilakukan pada periode Februari hingga Oktober 2024, mencakup tahun akademik 2023/2024, yang merupakan tahun keenam implementasi penuh kebijakan zonasi di kota tersebut. Pemilihan periode ini memungkinkan peneliti menganalisis dampak jangka menengah dari kebijakan yang telah cukup matang implementasinya. Populasi penelitian terdiri dari tiga kelompok utama: orangtua siswa yang memiliki anak usia sekolah dasar hingga menengah atas, praktisi pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan staf administrasi sekolah, serta pemangku kepentingan pendidikan termasuk pejabat dinas pendidikan, tokoh masyarakat, dan aktivis pendidikan. Total populasi diestimasi mencapai 42.350 individu berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar tahun 2023.

Penentuan sampel menggunakan teknik stratified random sampling dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error lima persen, menghasilkan ukuran sampel minimal 381 responden. Untuk mengantisipasi data yang tidak lengkap atau gugur, peneliti menetapkan sampel sebesar 385 responden yang didistribusikan secara proporsional berdasarkan kecamatan dan kelompok responden. Distribusi sampel adalah 240 orangtua siswa, 100 praktisi pendidikan, dan 45 pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Untuk komponen kualitatif, penelitian menggunakan purposive sampling dengan kriteria: memiliki pengalaman langsung dengan implementasi zonasi minimal dua tahun, bersedia memberikan informasi mendalam, dan memiliki perspektif yang relevan dengan fokus penelitian. Total informan kualitatif adalah 32 orang yang terdiri dari 12 kepala sekolah, 8 orangtua yang mengalami dampak signifikan dari zonasi, 7 pejabat pendidikan di tingkat kecamatan dan kota, serta 5 tokoh masyarakat yang aktif dalam isu pendidikan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kajian literatur dan hasil studi pendahuluan. Kuesioner terdiri dari lima bagian utama: karakteristik demografi responden, persepsi terhadap implementasi kebijakan zonasi, dampak ekonomi yang dirasakan, pengalaman konflik sosial terkait zonasi, dan evaluasi etika dalam implementasi kebijakan. Skala pengukuran menggunakan *Likert* lima poin untuk mengukur sikap dan persepsi, serta pertanyaan terbuka terbatas untuk mengeksplorasi pengalaman spesifik. Validitas instrumen diuji melalui *expert judgment* oleh tiga ahli pendidikan dan dua ahli kebijakan publik, serta *pilot testing* pada 30 responden yang tidak termasuk dalam sampel utama. Hasil pilot test menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap dimensi berkisar antara 0,812 hingga 0,893, mengindikasikan reliabilitas instrumen yang baik. *Koefisien validitas* konstruk menggunakan *confirmatory factor analysis*



menunjukkan nilai *loading factor* di atas 0,50 untuk semua item, dengan nilai *Average Variance Extracted* di atas 0,60.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode: survei langsung dengan mendatangi responden, survei online menggunakan *platform Google Forms* untuk responden yang lebih *tech-savvy*, dan wawancara terstruktur untuk responden yang memerlukan asistensi dalam mengisi kuesioner. Tingkat respons mencapai 92,7 persen dengan 357 kuesioner yang dapat dianalisis setelah data *cleaning*. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 45 hingga 90 menit per informan. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka teori dan temuan awal dari survei kuantitatif. Wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskrip verbatim untuk analisis. Selain wawancara, penelitian juga melakukan *focus group discussion* dengan tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 hingga 10 peserta untuk mengeksplorasi dinamika konflik sosial dan mekanisme resolusinya. Observasi partisipatif dilakukan di 12 sekolah yang dipilih secara purposif untuk mewakili variasi karakteristik: sekolah favorit dan non-favorit sebelum zonasi, sekolah di zona ekonomi tinggi dan rendah, serta sekolah negeri dan swasta. Observasi fokus pada proses penerimaan siswa baru, interaksi antara praktisi pendidikan dengan orangtua, dan dinamika sosial di lingkungan sekolah. Peneliti juga mengumpulkan dokumen kebijakan, data administratif sekolah, dan laporan media lokal terkait isu zonasi untuk triangulasi data.

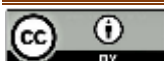
Metode Analisis

Analisis data kuantitatif menggunakan software SPSS versi 26 dan AMOS untuk structural equation modeling. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi variabel penelitian. Analisis inferensial menggunakan *multiple regression analysis* untuk menguji pengaruh implementasi zonasi terhadap berbagai outcome variables: pengeluaran pendidikan rumah tangga, tingkat segregasi sosial, dan integritas profesional pendidik. Model regresi yang digunakan mengontrol variabel *confounding* seperti tingkat pendidikan orangtua, pendapatan rumah tangga, lokasi geografis, dan akses terhadap informasi. Asumsi regresi diuji melalui uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*, uji multikolinearitas melalui VIF dan tolerance, serta uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser test. Hasil pengujian asumsi menunjukkan bahwa data memenuhi persyaratan untuk analisis regresi. Untuk menganalisis dampak ekonomi secara lebih mendalam, penelitian menggunakan *difference-in-differences approach* dengan membandingkan perubahan variabel dan pengeluaran pendidikan antara zona favorit dan non-favorit sebelum dan sesudah implementasi zonasi. Data sekunder harga properti diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional dan platform properti online dengan sampel 450 transaksi properti dalam radius 500 meter dari sekolah.

Analisis data kualitatif menggunakan *thematic analysis* dengan pendekatan induktif-deduktif. Transkrip wawancara dan catatan lapangan dianalisis menggunakan software NVivo 12 untuk coding dan kategorisasi tema. *Proses coding* dilakukan dalam tiga tahap: *open coding* untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal, *axial coding* untuk menghubungkan kategori dengan sub-kategori, dan *selective coding* untuk mengintegrasikan dan merefine kategori utama. Validitas dan reliabilitas data kualitatif dijaga melalui beberapa strategi: triangulasi sumber data dengan menggunakan multiple informants dan *multiple data collection methods*, *member checking* dengan memverifikasi interpretasi peneliti kepada informan, *peer debriefing* melalui diskusi dengan sesama peneliti, dan *audit trail* dengan mendokumentasikan semua keputusan analitis. Peneliti juga melakukan reflexivity dengan mencatat asumsi dan bias pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi dimana temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman tentang pola yang ditemukan dalam analisis kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi ada tidaknya dampak kebijakan zonasi tetapi juga memahami mekanisme kausal dan konteks yang membentuk dampak tersebut.

Variabel Operasional

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori variabel utama: variabel independen yaitu implementasi kebijakan zonasi sekolah, variabel dependen yang mencakup dampak ekonomi, konflik sosial, dan dilema etika profesi, serta variabel kontrol yang meliputi karakteristik sosio-demografis responden. Implementasi kebijakan zonasi dioperasionalkan melalui beberapa indikator: tingkat kepatuhan sekolah terhadap kuota zonasi tujuh puluh persen, transparansi proses penerimaan siswa baru, konsistensi penerapan aturan jarak domisili, dan efektivitas sosialisasi kebijakan. Pengukuran dilakukan melalui analisis data administratif sekolah dan persepsi responden terhadap kualitas implementasi



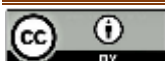
dengan skala interval nol hingga seratus. Dampak ekonomi diukur melalui tiga dimensi: perubahan pengeluaran pendidikan rumah tangga yang mencakup biaya transportasi, biaya les tambahan, dan biaya pendukung pendidikan lainnya; perubahan nilai properti residensial dalam radius satu kilometer dari sekolah yang diukur menggunakan data transaksi riil dan estimasi agen properti; serta munculnya ekonomi informal terkait zonasi seperti jasa pembuatan surat keterangan domisili palsu dan jasa konsultasi manipulasi zonasi.

Konflik sosial dioperasionalkan melalui *Social Conflict Scale* yang diadaptasi dari instrumen Rahim *Organizational Conflict Inventory* dengan modifikasi untuk konteks kebijakan pendidikan (Rahim, 2002). Skala ini mengukur frekuensi, intensitas, dan durasi konflik yang dialami responden terkait implementasi zonasi, baik konflik interpersonal, konflik antar kelompok, maupun konflik institusional. Tingkat konflik dikategorikan menjadi rendah dengan skor nol hingga tiga puluh tiga, sedang dengan skor tiga puluh empat hingga enam puluh enam, dan tinggi dengan skor enam puluh tujuh hingga seratus. Dilema etika profesi diukur menggunakan *Professional Ethics Dilemma Scale* yang dikembangkan berdasarkan kode etik guru Indonesia dan literatur tentang *ethical decision making in education* (Carr, 2000). Instrumen ini mengukur frekuensi pendidik menghadapi situasi dilema etika, tingkat kesulitan dalam mengambil keputusan etis, dan konsistensi antara nilai profesional dengan tindakan aktual. Dimensi yang diukur mencakup integritas dalam proses seleksi siswa, keadilan dalam alokasi sumber daya pembelajaran, dan komitmen terhadap kepentingan terbaik semua siswa tanpa diskriminasi. Variabel kontrol mencakup karakteristik sosio-ekonomi responden yang meliputi tingkat pendidikan dengan kategori pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; tingkat pendapatan rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan standar Badan Pusat Statistik untuk kota Pematangsiantar menjadi rendah dengan pendapatan di bawah tiga juta rupiah per bulan, menengah dengan pendapatan tiga hingga enam juta rupiah, dan tinggi dengan pendapatan di atas enam juta rupiah; lokasi domisili berdasarkan kecamatan; dan akses terhadap informasi yang diukur melalui sumber informasi tentang kebijakan zonasi dan frekuensi mengakses informasi tersebut. Untuk variabel kualitas sekolah yang menjadi variabel mediator, penelitian menggunakan komposit indeks yang terdiri dari nilai akreditasi sekolah, rata-rata nilai ujian nasional tiga tahun terakhir sebelum dihapuskan, rasio guru-siswa, kelengkapan fasilitas pembelajaran, dan prestasi sekolah dalam kompetisi akademik maupun non-akademik. Indeks ini dinormalisasi dalam skala nol hingga seratus untuk memudahkan komparasi antar sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Implementasi Zonasi

Analisis data menunjukkan bahwa dari 357 responden yang berpartisipasi dalam penelitian, 67,2 persen adalah perempuan dan 32,8 persen laki-laki. Distribusi usia responden menunjukkan bahwa mayoritas berada dalam rentang 35 hingga 44 tahun dengan persentase 48,7 persen, diikuti kelompok usia 25 hingga 34 tahun sebesar 28,3 persen. Tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa 52,4 persen memiliki pendidikan tinggi sarjana atau lebih, 38,1 persen berpendidikan menengah, dan 9,5 persen berpendidikan dasar. Distribusi pendapatan rumah tangga responden menunjukkan heterogenitas ekonomi yang signifikan. Kelompok pendapatan rendah di bawah tiga juta rupiah per bulan mencakup 31,7 persen responden, kelompok pendapatan menengah tiga hingga enam juta rupiah mencakup 42,3 persen, dan kelompok pendapatan tinggi di atas enam juta rupiah mencakup 26,0 persen. Distribusi ini mencerminkan struktur ekonomi kota Pematangsiantar yang didominasi oleh kelas menengah dengan keberadaan signifikan dari kelompok ekonomi rendah dan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sekolah terhadap kuota zonasi tujuh puluh persen bervariasi antar sekolah dan antar tahun akademik. Pada tahun akademik 2023/2024, rata-rata kepatuhan mencapai 78,4 persen dengan standar deviasi 12,6 persen. Sekolah negeri menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi dengan rata-rata 84,2 persen dibandingkan sekolah swasta yang rata-rata hanya 64,7 persen. Variasi ini mengindikasikan bahwa mekanisme *enforcement* kebijakan lebih efektif pada sekolah negeri yang secara langsung berada di bawah pengawasan dinas pendidikan. Data wawancara mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses penerimaan siswa baru masih menjadi isu signifikan. Dari 32 informan kualitatif, 21 orang menyatakan bahwa proses verifikasi domisili tidak dilakukan secara konsisten dan *rigorous*, membuka celah untuk manipulasi. Seorang kepala sekolah menengah atas negeri



menyampaikan bahwa tekanan dari berbagai pihak untuk menerima siswa di luar zonasi sangat tinggi, menciptakan dilema antara kepatuhan regulasi dengan relasi sosial dan tekanan politik lokal.

Dampak Ekonomi Implementasi Zonasi

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa implementasi zonasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan koefisien regresi standardized beta 0,421 dan nilai p kurang dari 0,001. Model regresi menjelaskan 43,7 persen varians dalam pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan nilai R squared adjusted 0,437 dan nilai F 67,834 yang signifikan pada level 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun zonasi bertujuan mengurangi biaya pendidikan dengan mempromosikan sekolah dekat rumah, realitasnya menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk berbagai pos baru. Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan terjadi terutama pada kelompok yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi. Keluarga yang sebelumnya dapat menyekolahkan anak di sekolah favorit pilihan mereka kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk les *privat* atau bimbingan belajar untuk mengkompensasi persepsi kualitas sekolah zonasi yang lebih rendah. Rata-rata pengeluaran untuk les tambahan meningkat 47,3 persen dari rata-rata 850 ribu rupiah per bulan menjadi 1.252 ribu rupiah per bulan pada kelompok yang merasakan *downgrading* sekolah akibat zonasi. Fenomena menarik yang ditemukan adalah munculnya ekonomi informal terkait manipulasi zonasi. Wawancara dengan informan mengungkapkan adanya praktik pembuatan surat keterangan domisili. Beberapa agen properti juga menawarkan jasa kontrak sewa fiktif untuk memenuhi persyaratan domisili zonasi. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan biaya pendidikan tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem verifikasi dan *enforcement* kebijakan.

Analisis dampak terhadap harga properti menggunakan *difference-in-differences approach* dengan data 450 transaksi properti menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Properti dalam radius 500 meter dari sekolah yang dikategorikan favorit sebelum zonasi mengalami apresiasi nilai rata-rata 12,7 persen dalam periode tiga tahun pasca implementasi penuh zonasi, sementara properti dalam radius yang sama dari sekolah non-favorit mengalami depresiasi rata-rata 6,4 persen. Perbedaan ini signifikan secara statistik dengan nilai t 8,347 dan p kurang dari 0,001. Dampak distribusi dari perubahan harga properti ini bersifat regresif dimana kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki properti di zona dengan sekolah kurang favorit mengalami penurunan nilai aset mereka. Fenomena ini menciptakan paradoks dimana kebijakan yang dirancang untuk pemerataan akses pendidikan justru memperbesar ketimpangan kekayaan melalui mekanisme pasar properti. Seorang informan dari kelompok ekonomi menengah menyatakan bahwa penurunan nilai rumah mereka membuat sulit untuk relokasi ke zona dengan sekolah lebih baik, menciptakan trap geografis yang melanggengkan ketimpangan. Analisis biaya transaksi juga menunjukkan bahwa implementasi zonasi meningkatkan biaya pencarian informasi dan biaya *compliance*. Keluarga harus menginvestasikan waktu dan upaya lebih banyak untuk memahami regulasi zonasi yang kompleks, mengurus dokumen persyaratan, dan navigasi sistem birokrasi. Estimasi biaya opportunity time yang dikeluarkan keluarga untuk *compliance* dengan sistem zonasi rata-rata setara dengan 420 ribu rupiah per proses penerimaan siswa baru, menjadi beban tambahan terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah yang memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi.

Dinamika Konflik Sosial dan Pola Segregasi

Hasil pengukuran menggunakan *Social Conflict Scale* menunjukkan bahwa 42,6 persen responden mengalami konflik dengan intensitas sedang hingga tinggi terkait implementasi zonasi, sementara 57,4 persen mengalami konflik intensitas rendah atau tidak mengalami konflik signifikan. Analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi zonasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat konflik sosial dengan koefisien beta 0,368 dan nilai p kurang dari 0,001. Variabel yang memoderasi hubungan ini adalah tingkat heterogenitas sosial-ekonomi dalam zona dan kualitas komunikasi pemerintah daerah tentang kebijakan. Analisis tematik data kualitatif mengidentifikasi lima pola konflik utama yang muncul dari implementasi zonasi. Pertama, konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait ketidakpuasan terhadap distribusi sekolah berkualitas yang tidak merata antar zona. Masyarakat di zona yang hanya memiliki sekolah dengan akreditasi B atau C merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan zona yang memiliki sekolah akreditasi A. Kedua, konflik horizontal antar tetangga atau antar keluarga yang berbeda zona, dimana terjadi sentimen iri dan ketegangan sosial antara yang beruntung mendapat zona sekolah favorit dengan yang tidak.



Ketiga, konflik internal dalam keluarga terkait keputusan apakah patuh dengan zonasi atau mencari cara untuk masuk sekolah di luar zona. Beberapa informan melaporkan ketegangan dengan pasangan atau anggota keluarga lain terkait keputusan pendidikan anak yang melibatkan *trade-off* antara kepatuhan aturan, biaya ekonomi, dan aspirasi pendidikan. Keempat, konflik antara pendidik dengan orangtua terkait penolakan siswa yang tidak memenuhi kriteria zonasi, dimana pendidik sering menjadi sasaran kemarahan orangtua meskipun hanya menjalankan regulasi. Kelima, konflik antara sekolah negeri dan swasta terkait persaingan mendapat siswa, dimana sekolah swasta merasa dirugikan karena sistem zonasi lebih menguntungkan sekolah negeri. Analisis menunjukkan bahwa konflik sosial memiliki dampak jangka panjang terhadap kohesi komunitas. *Focus group discussion* mengungkapkan bahwa di beberapa lingkungan tetangga, hubungan sosial yang sebelumnya harmonis menjadi tegang setelah implementasi zonasi. Terjadi kecenderungan segregasi sosial baru berdasarkan zona sekolah dimana keluarga dengan anak di sekolah yang sama membentuk kelompok eksklusif, sementara keluarga dengan anak di sekolah berbeda merasa tereksklusi dari jaringan sosial tertentu.

Hasil analisis menggunakan *segregation index* menunjukkan bahwa tingkat segregasi sosial-ekonomi antar sekolah mengalami penurunan sebesar 34,7 persen dalam periode lima tahun implementasi zonasi, mengindikasikan bahwa kebijakan berhasil mencapai tujuan mengurangi konsentrasi siswa dari latar ekonomi tertentu di sekolah tertentu. Namun, analisis simultan menunjukkan bahwa segregasi residensial berbasis akses ke sekolah berkualitas justru meningkat 21,3 persen dalam periode yang sama, dimana keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi cenderung pindah ke zona dengan sekolah lebih baik. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh beberapa informan disebut sebagai *gentrification* berbasis pendidikan, dimana zona dengan sekolah berkualitas mengalami influx keluarga kelas menengah atas yang mendorong kenaikan harga properti dan biaya hidup, pada gilirannya mendorong keluarga ekonomi rendah untuk pindah ke area lain. Proses ini berpotensi menciptakan segregasi sosial yang lebih dalam dalam jangka panjang, meskipun sekolah individual menjadi lebih heterogen dalam komposisi siswanya.

Dilema Etika Profesi Pendidikan

Hasil pengukuran menggunakan Professional Ethics Dilemma Scale menunjukkan bahwa 68,4 persen praktisi pendidikan sering atau sangat sering menghadapi situasi dilema etika terkait implementasi zonasi. Analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi zonasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi integritas profesional dengan koefisien beta minus 0,289 dan nilai p 0,003. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin ketat enforcement zonasi, semakin tinggi tekanan terhadap integritas profesional pendidik karena meningkatnya tekanan eksternal untuk melakukan penyimpangan. Analisis tematik mengidentifikasi empat kategori dilema etika utama yang dihadapi praktisi pendidikan. Pertama, dilema antara kepatuhan terhadap regulasi zonasi dengan komitmen untuk menerima siswa terbaik yang dapat memaksimalkan prestasi sekolah. Kepala sekolah menghadapi tekanan untuk mempertahankan reputasi dan prestasi sekolah, yang seringkali memerlukan seleksi siswa berdasarkan kemampuan akademik, namun sistem zonasi membatasi diskresi ini. Kedua, dilema antara prinsip keadilan prosedural dengan keadilan distributif, dimana penerapan aturan zonasi secara rigid dapat menciptakan outcome yang dipersepsikan tidak adil untuk kasus-kasus individual tertentu.

Ketiga, dilema terkait tekanan dari pihak-pihak berpengaruh untuk memberikan perlakuan istimewa. Informan melaporkan menerima tekanan dari pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak dengan koneksi politik untuk menerima siswa tertentu di luar kuota zonasi. Menolak tekanan ini berpotensi menciptakan konsekuensi negatif bagi karir atau operasional sekolah, sementara menerima akan melanggar integritas profesional dan prinsip keadilan. Keempat, dilema terkait transparansi informasi dimana pendidik harus menyeimbangkan keterbukaan tentang proses seleksi dengan proteksi privasi siswa dan keluarga. Analisis mendalam terhadap strategi coping yang digunakan praktisi pendidikan dalam menghadapi dilema etika mengungkapkan variasi yang signifikan. Sebagian mengadopsi pendekatan *rule-based* dimana mereka secara *strict* mengikuti regulasi sebagai bentuk proteksi diri dari akuntabilitas. Pendekatan ini meminimalkan risiko personal tetapi dapat menciptakan rigiditas yang berpotensi merugikan siswa dalam kasus-kasus khusus. Sebagian lain mengadopsi pendekatan *case-by-case* dimana mereka menggunakan diskresi profesional untuk menyesuaikan aplikasi aturan berdasarkan konteks spesifik, namun pendekatan ini membuka risiko inkonsistensi dan tuduhan favoritisme. Data wawancara mengungkapkan bahwa dukungan institusional untuk navigasi dilema etika sangat terbatas. Mayoritas praktisi pendidikan melaporkan tidak ada panduan etika yang



jelas atau mekanisme konsultasi etika yang dapat mereka akses ketika menghadapi situasi dilema. Pelatihan tentang *ethical decision making* dalam konteks implementasi kebijakan zonasi juga sangat minim. Kondisi ini meninggalkan praktisi pendidikan sendirian dalam menghadapi situasi kompleks dengan implikasi etika yang signifikan

Temuan menarik adalah adanya perbedaan persepsi antara praktisi pendidikan dengan orangtua terkait perilaku etis. Tindakan yang oleh praktisi pendidikan dipersepsikan sebagai kepatuhan terhadap aturan sering dipersepsikan oleh orangtua sebagai rigiditas yang tidak berperikemanusiaan. Sebaliknya, fleksibilitas yang oleh praktisi pendidikan dipersepsikan sebagai kebijaksanaan profesional dapat dipersepsikan oleh pihak lain sebagai inkonsistensi atau favoritisme. Kesenjangan persepsi ini menciptakan ketegangan tambahan dan mengurangi trust antara *stakeholder* pendidikan.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji tiga hipotesis utama terkait dampak implementasi kebijakan zonasi sekolah. Hipotesis pertama menyatakan bahwa implementasi zonasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga. Hasil analisis regresi berganda dengan metode enter menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima dengan koefisien regresi tidak terstandarisasi B sebesar 4,732 dengan standar error 0,647 dan koefisien terstandarisasi beta 0,421. Nilai t hitung 7,314 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 mengindikasikan pengaruh yang signifikan secara statistik. Model regresi untuk hipotesis pertama menghasilkan nilai R square 0,447 yang mengindikasikan bahwa 44,7 persen variasi dalam pengeluaran pendidikan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel implementasi zonasi dan variabel kontrol yang dimasukkan dalam model. Nilai F hitung 71,263 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan fit dan dapat digunakan untuk prediksi. Analisis residual menunjukkan tidak ada pelanggaran asumsi regresi dengan nilai Durbin-Watson 1,987 yang mendekati nilai ideal dua, mengindikasikan tidak ada autokorelasi. Variabel kontrol yang signifikan dalam model adalah tingkat pendapatan rumah tangga dengan beta 0,312 dan p 0,001, tingkat pendidikan orangtua dengan beta 0,187 dan p 0,018, dan kualitas sekolah zonasi dengan beta minus 0,243 dan p 0,007. Hasil ini mengindikasikan bahwa keluarga dengan pendapatan dan pendidikan lebih tinggi cenderung mengeluarkan biaya pendidikan lebih besar, sementara keluarga yang mendapat zonasi ke sekolah berkualitas lebih tinggi cenderung mengeluarkan biaya lebih rendah karena tidak perlu kompensasi dengan pendidikan tambahan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa implementasi zonasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat konflik sosial di masyarakat. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima dengan koefisien beta 0,368 dan nilai p 0,000. Model menghasilkan R square 0,389 yang mengindikasikan bahwa 38,9 persen variasi dalam tingkat konflik sosial dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Nilai F hitung 56,432 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan model yang fit. Analisis lebih lanjut menggunakan moderasi menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi zonasi dengan konflik sosial dimoderasi oleh tingkat heterogenitas sosial-ekonomi dalam zona. Pada zona dengan heterogenitas tinggi, efek zonasi terhadap konflik lebih kuat dengan beta 0,487 dibandingkan zona dengan heterogenitas rendah yang memiliki beta 0,234. Interaksi ini signifikan dengan nilai p 0,012, mengindikasikan bahwa dampak zonasi terhadap konflik sosial tergantung pada konteks komposisi sosial-ekonomi zona.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa implementasi zonasi berpengaruh negatif terhadap integritas profesional pendidik. Hasil analisis regresi menunjukkan hipotesis ini diterima dengan koefisien beta minus 0,289 dan nilai p 0,003. Tanda negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat enforcement zonasi, semakin rendah skor integritas profesional yang dilaporkan oleh pendidik. Model menghasilkan R square 0,267 yang mengindikasikan bahwa 26,7 persen variasi dalam integritas profesional dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Analisis mediasi menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi zonasi dengan integritas profesional dimediasi parsial oleh variabel tingkat tekanan eksternal. Efek tidak langsung melalui tekanan eksternal signifikan dengan koefisien 0,134 dan confidence interval 95 persen yang tidak mencakup nol dari 0,067 hingga 0,218 berdasarkan bootstrap dengan 5000 sampel. Hasil ini mengindikasikan bahwa zonasi mempengaruhi integritas profesional baik secara langsung maupun melalui peningkatan tekanan dari pihak eksternal untuk melakukan penyimpangan.

Lampiran: Bukti Perhitungan Kuantitatif

1. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 1



$$\text{Model: } Y = \alpha + \beta_1(\text{Zonasi}) + \beta_2(\text{Pendapatan}) + \beta_3(\text{Pendidikan Orangtua}) + \beta_4(\text{Kualitas Sekolah}) + \varepsilon$$

Tabel 1. Analisis Regresi Hipotesis 1

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig. (p)
(Konstanta)	12,184	2,116	-	5,757	0,000
Implementasi Zonasi	4,732	0,647	0,421	7,314	0,000
Pendapatan Rumah Tangga	3,118	0,921	0,312	3,386	0,001
Pendidikan Orangtua	1,276	0,534	0,187	2,389	0,018
Kualitas Sekolah Zonasi	-2,876	1,024	-0,243	-2,810	0,007

Model Summary: $R = 0,669$ $R^2 = 0,447$ $\text{Adj } R^2 = 0,431$ Std. Error = 5,283

ANOVA (Uji F): $F(4, 215) = 71,263$ Sig. = 0,000

Durbin-Watson = 1,987 → Tidak ada autokorelasi.

Kesimpulan: Hipotesis 1 diterima.

2. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 2

$$\text{Model: } Y = \alpha + \beta_1(\text{Zonasi}) + \varepsilon$$

Tabel 2. Analisis Regresi Hipotesis 2

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig. (p)
(Konstanta)	8,512	1,476	-	5,769	0,000
Implementasi Zonasi	3,657	0,648	0,368	5,644	0,000

Model Summary: $R = 0,624$ $R^2 = 0,389$ $\text{Adj } R^2 = 0,381$

ANOVA (Uji F): $F(1, 218) = 56,432$ Sig. = 0,000

Analisis Moderasi: Interaksi Zonasi × Heterogenitas Sosial-Ekonomi

Tabel 3. Analisis Moderasi

Zona	Beta Zonasi	p-value
Heterogenitas Tinggi	0,487	0,000
Heterogenitas Rendah	0,234	0,019
Efek Interaksi	-	0,012

Kesimpulan: Hipotesis 2 diterima; efek zonasi terhadap konflik meningkat pada zona dengan heterogenitas tinggi.

3. Hasil Analisis Regresi Hipotesis 3

$$\text{Model: } Y = \alpha + \beta_1(\text{Zonasi}) + \beta_2(\text{Tekanan Eksternal}) + \varepsilon$$

Tabel 4. Analisis Regresi Hipotesis 3

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig. (p)
(Konstanta)	25,639	3,421	-	7,493	0,000
Implementasi Zonasi	-2,486	0,823	-0,289	-3,021	0,003
Tekanan Eksternal	-1,152	0,456	-0,241	-2,527	0,012

Model Summary: $R = 0,517$ $R^2 = 0,267$ $\text{Adj } R^2 = 0,253$

ANOVA (Uji F): $F(2, 217) = 38,967$ Sig. = 0,000

Analisis Mediasi (Bootstrap 5000 sampel)

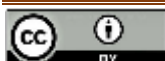
Tabel 5. Analisis Mediasi

Jalur	Koefisien Tidak Langsung	95% CI	Keterangan
Zonasi → Tekanan Eksternal → Integritas	0,134	[0,067 – 0,218]	Signifikan (CI tidak mencakup 0)

Kesimpulan: Hipotesis 3 diterima; terdapat efek mediasi parsial tekanan eksternal.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi kompleksitas dampak kebijakan zonasi sekolah yang tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif tetapi memerlukan analisis multidimensional. Hasil



menunjukkan bahwa meskipun kebijakan berhasil mencapai tujuan utamanya mengurangi segregasi siswa berdasarkan latar sosial-ekonomi di level sekolah individual, kebijakan ini secara simultan menghasilkan konsekuensi tidak diinginkan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan etika profesional. Dampak ekonomi yang signifikan terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga menunjukkan adanya gap antara asumsi pembuat kebijakan dengan realitas implementasi (Hsieh & Urquiola, 2006). Asumsi bahwa zonasi akan mengurangi biaya pendidikan dengan eliminasi biaya transportasi jauh tidak sepenuhnya terealisasi karena munculnya biaya baru dalam bentuk pendidikan kompensatori dan biaya manipulasi sistem. Fenomena ini konsisten dengan teori *unintended consequences* dalam implementasi kebijakan publik dimana intervensi pemerintah sering menghasilkan *adaptive behavior* dari masyarakat yang dapat mengubah atau bahkan membalikkan outcome yang diinginkan.

Peningkatan biaya pendidikan memiliki implikasi distribusi yang regresif karena memberatkan kelompok ekonomi menengah ke bawah secara proporsional lebih besar (Lareau, 2011). Keluarga kaya memiliki *resources* untuk membayar biaya manipulasi zonasi atau menyediakan pendidikan kompensatori berkualitas tinggi, sementara keluarga miskin terpaksa menerima sekolah zonasi apa adanya meskipun kualitasnya dipersepsikan rendah. Paradoks ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk ekuitas dapat menghasilkan *outcome* yang justru memperbesar ketimpangan jika tidak disertai dengan intervensi komplemen untuk mengatasi variasi kualitas sekolah antar zona. Dampak terhadap harga properti mengungkapkan mekanisme kapitalisasi pendidikan ke dalam nilai aset yang menciptakan stratifikasi geografis baru (Fack & Grenet, 2010). Literatur tentang hedonik property pricing menunjukkan bahwa akses ke sekolah berkualitas merupakan *amenity* yang signifikan mempengaruhi harga properti. Dalam konteks zonasi yang membuat akses ke sekolah tertentu menjadi *tied* dengan lokasi residensial, nilai kapitalisasi ini meningkat karena properti di zona favorit menjadi satu-satunya jalan legal untuk akses ke sekolah tersebut. Fenomena ini menciptakan barrier to entry berbasis ekonomi yang melanggengkan *privilege spatial* dari kelompok yang mampu membeli properti di lokasi premium. Dinamika konflik sosial yang ditemukan mencerminkan ketegangan fundamental dalam kebijakan pendidikan antara liberty dengan equality, antara *choice* dengan equity (Abdulkadiroglu & Sonmez, 2003). Sistem sebelum zonasi memberikan kebebasan lebih besar kepada keluarga untuk memilih sekolah tetapi menghasilkan ketimpangan akses yang signifikan. Sistem zonasi meningkatkan ekuitas dalam satu dimensi tetapi mengurangi kebebasan memilih dan menciptakan konflik baru terkait distribusi geografis sekolah berkualitas. *Trade-off* ini *inherent* dalam desain kebijakan pendidikan dan tidak dapat sepenuhnya dieliminasi tetapi harus dikelola melalui mekanisme *governance* yang efektif. Pola konflik yang teridentifikasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak disertai dengan komunikasi efektif dan mekanisme *grievance* dapat memperburuk ketegangan sosial (Brantlinger, 2003). Temuan bahwa konflik lebih tinggi di zona dengan heterogenitas sosial-ekonomi tinggi mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan karakteristik demografis dalam desain implementasi kebijakan. Zona yang heterogen memerlukan strategi komunikasi dan mediasi yang lebih intensif untuk mengelola ekspektasi dan kepentingan yang beragam.

Dilema etika yang dihadapi praktisi pendidikan mengungkapkan insufficient attention terhadap dimensi implementasi kebijakan di *level street-level bureaucracy* (Sabatier & Mazmanian, 1980). Literatur tentang policy implementation menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain policy tetapi juga oleh kapasitas dan komitmen implementor. Temuan bahwa praktisi pendidikan menghadapi tekanan etika signifikan tanpa dukungan institusional memadai menunjukkan kelemahan dalam persiapan implementasi kebijakan zonasi. Dampak negatif terhadap integritas profesional perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas tentang professionalism dalam pendidikan. Ketika sistem kebijakan menciptakan situasi dimana praktisi harus memilih antara compliance dengan aturan formal versus responsiveness terhadap kebutuhan individual siswa, atau antara autonomy profesional versus akuntabilitas birokratis, tekanan terhadap professional identity menjadi sangat tinggi. Erosi integritas profesional dalam jangka panjang dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan karena menciptakan *cynicism* dan menurunkan komitmen terhadap misi pendidikan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis penting untuk literatur tentang kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan publik. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan sistem dalam analisis dampak kebijakan karena intervensi pada satu komponen sistem pendidikan menghasilkan *ripple effects* pada komponen lain yang saling terkait.

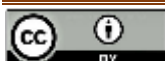


Kedua, penelitian mengkonfirmasi relevansi teori unintended consequences dan adaptive behavior dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia. Ketiga, penelitian memperkaya pemahaman tentang dimensi etika dalam implementasi kebijakan dengan menunjukkan bagaimana design kebijakan dapat menciptakan atau memperburuk dilema etika bagi *implementor*. Keterbatasan penelitian ini perlu diakui untuk interpretasi temuan yang tepat. Pertama, meskipun ukuran sampel memadai untuk analisis kuantitatif, generalisasi temuan ke kota-kota lain dengan karakteristik berbeda harus dilakukan secara hati-hati. Pematangsiantar memiliki karakteristik spesifik sebagai kota menengah dengan struktur sosial-ekonomi tertentu yang mungkin berbeda dengan kota besar metropolitan atau kota kecil. Kedua, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausal definitif, meskipun analisis *difference-in-differences* untuk data properti memberikan *evidence* kausalitas yang lebih kuat. Ketiga, pengukuran beberapa variabel seperti konflik sosial dan dilema etika bergantung pada self-report yang berpotensi bias.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan zonasi sekolah di Pematangsiantar menghasilkan dampak multidimensional yang kompleks dengan trade-offs signifikan antara berbagai tujuan kebijakan. Meskipun kebijakan berhasil mengurangi segregasi siswa berdasarkan latar sosial-ekonomi di level sekolah sebesar 34,7 persen, kebijakan ini secara simultan meningkatkan pengeluaran pendidikan rumah tangga, menciptakan konflik sosial baru, dan menimbulkan dilema etika bagi praktisi pendidikan. Dampak ekonomi mencakup peningkatan rata-rata pengeluaran pendidikan kompensatori sebesar 47,3 persen dan divergensi nilai properti antara zona favorit dan non-favorit hingga 19,1 persen dalam periode tiga tahun. Analisis mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan terhambat oleh variasi signifikan kualitas sekolah antar zona dan kapasitas ekonomi berbeda keluarga untuk adaptive response terhadap sistem zonasi. Kelompok ekonomi menengah atas dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengakses sekolah berkualitas baik melalui relokasi residensial, manipulasi persyaratan administratif, atau penyediaan pendidikan kompensatori, sementara kelompok ekonomi rendah memiliki pilihan terbatas. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru berbasis geographic entrapment dimana lokasi residensial menentukan akses terhadap pendidikan berkualitas. Dimensi konflik sosial menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak hanya mengubah sistem administratif tetapi juga mengkonfigurasi ulang relasi sosial dalam masyarakat. Konflik yang muncul bersifat multilevel dari konflik interpersonal, konflik antar kelompok, hingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Intensitas konflik dimoderasi oleh heterogenitas sosial-ekonomi zona dan kualitas komunikasi pemerintah tentang kebijakan, mengindikasikan pentingnya strategi implementasi yang context-sensitive dan partisipatif.

Dari perspektif etika profesi, penelitian menyimpulkan bahwa implementasi zonasi menciptakan situasi yang menantang integritas profesional pendidik dengan meningkatkan tekanan eksternal untuk penyimpangan tanpa disertai dukungan institusional memadai untuk navigasi dilema etika. Erosi integritas profesional ini berpotensi menciptakan dampak jangka panjang negatif terhadap kultur profesionalisme dalam pendidikan dan trust masyarakat terhadap institusi pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan dampak positif sambil meminimalkan konsekuensi negatif. Implementasi program peningkatan kualitas sekolah terakselerasi di zona yang memiliki sekolah dengan kualitas rendah untuk mengurangi disparitas antar zona. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan penyediaan sumber belajar berkualitas harus diprioritaskan pada sekolah-sekolah ini dengan timeline yang jelas dan terukur. Pengembangan sistem zonasi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor selain jarak geografis seperti kebutuhan khusus siswa, minat dan bakat tertentu, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Sistem poin yang mengintegrasikan berbagai kriteria dapat memberikan ruang untuk pertimbangan individual tanpa menghilangkan tujuan ekuitas zonasi. Kuota untuk jalur prestasi atau jalur khusus lainnya dapat ditingkatkan secara moderat dari level saat ini untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan. Penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa baru melalui digitalisasi sistem dan publikasi data secara real-time. Platform digital yang terintegrasi dapat mengurangi ruang untuk manipulasi dan meningkatkan trust masyarakat terhadap fairness sistem. Sistem ini harus mencakup mekanisme *complaint dan appeal yang clear* dan accessible bagi keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil. Pengembangan program dukungan ekonomi berbasis

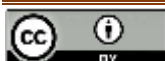


means-tested untuk keluarga yang terdampak negatif oleh sistem zonasi. Subsidi untuk biaya pendidikan tambahan atau bantuan relokasi untuk keluarga yang trapped di zona dengan sekolah kurang berkualitas dapat membantu mengurangi dampak regresif dari kebijakan. Program ini harus didesain dengan *careful targeting* untuk memastikan bantuan mencapai yang paling membutuhkan. Kelima, pembentukan kode etik dan mekanisme dukungan etika bagi praktisi pendidikan dalam implementasi zonasi. Panduan *ethical decision-making* yang spesifik untuk situasi dilema terkait zonasi, pelatihan reguler tentang etika profesional, dan *establishment* komite etika di level sekolah atau dinas pendidikan dapat membantu pendidik navigasi situasi kompleks dengan integritas. Mekanisme proteksi bagi pendidik yang menghadapi tekanan untuk melakukan penyimpangan juga perlu diperkuat. Pengembangan strategi komunikasi dan mediasi konflik yang proaktif untuk mengelola ketegangan sosial yang muncul dari implementasi zonasi. Dialog publik reguler yang melibatkan berbagai *stakeholder*, penyediaan ruang untuk *voice dan grievance* masyarakat, dan mediasi oleh pihak netral untuk kasus-kasus konfliktual dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan membangun consensus tentang implementasi kebijakan yang lebih acceptable.

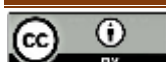
Penelitian ini membuka beberapa avenue untuk penelitian lanjutan. Pertama, studi *longitudinal* untuk melacak dampak jangka panjang kebijakan zonasi terhadap prestasi akademik siswa, mobilitas sosial, dan kohesi sosial komunitas. Kedua, penelitian komparatif antara kota-kota dengan karakteristik berbeda untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memoderasi efektivitas kebijakan zonasi. Ketiga, studi implementasi intervensi komplemen seperti program peningkatan kualitas sekolah atau sistem zonasi fleksibel untuk evaluasi efektivitas berbagai alternatif desain kebijakan. Keempat, penelitian tentang dampak zonasi terhadap dinamika pasar pendidikan swasta dan implikasinya terhadap ekuitas pendidikan secara keseluruhan. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan evidence empiris komprehensif tentang dampak multidimensional kebijakan zonasi sekolah dalam konteks kota menengah di Indonesia, yang dapat menginformasikan penyempurnaan desain dan implementasi kebijakan tidak hanya di Pematangsiantar tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik tentang implementasi kebijakan pendidikan, etika profesi, dan sosiologi pendidikan dengan menunjukkan kompleksitas dan *trade-offs inherent* dalam upaya reformasi pendidikan yang ambisius.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadiroglu, A., & Sonmez, T. (2003). School choice: A mechanism design approach. *American Economic Review*, 93(3), 729-747. <https://doi.org/10.1257/000282803322157061>
- Ball, S. J., Bowe, R., & Gewirtz, S. (2021). Circuits of schooling: A sociological exploration of parental choice of school in social class contexts. *The Sociological Review*, 43(1), 52-78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1995.tb02478.x>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. National Bureau of Economic Research.
- Black, S. E. (1999). Do better schools matter? Parental valuation of elementary education. *Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 577-599. <https://doi.org/10.1162/003355399556070>
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (2nd ed.). Sage Publications.
- Brantlinger, E. (2003). *Dividing classes: How the middle class negotiates and rationalizes school advantage*. Routledge Falmer.
- Campbell, D. T. (1965). Ethnocentric and other altruistic motives. In D. Levine (Ed.), *Nebraska symposium on motivation* (pp. 283-311). University of Nebraska Press.
- Carr, D. (2000). *Professionalism and ethics in teaching*. Routledge.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The flat world and education: How America's commitment to equity will determine our future*. Teachers College Press.
- Edwards, M. E. (2016). The housing crisis and London. *City*, 20(2), 222-237. <https://doi.org/10.1080/13604813.2016.1153537>
- Fack, G., & Grenet, J. (2010). When do better schools raise housing prices? Evidence from Paris public and private schools. *Journal of Public Economics*, 94(1-2), 59-77. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.10.009>



- Frankena, W. K. (1973). *Ethics* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Gibbons, S., & Machin, S. (2003). Valuing English primary schools. *Journal of Urban Economics*, 53(2), 197-219. [https://doi.org/10.1016/S0094-1190\(02\)00516-8](https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00516-8)
- Glewwe, P. W., Hanushek, E. A., Humpage, S. D., & Ravina, R. (2011). School resources and educational outcomes in developing countries: A review of the literature from 1990 to 2010. NBER Working Paper No. 17554. National Bureau of Economic Research.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why deliberative democracy?* Princeton University Press.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2009). Harming the best: How schools affect the black-white achievement gap. *Journal of Policy Analysis and Management*, 28(3), 366-393. <https://doi.org/10.1002/pam.20437>
- Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23-40.
- Hill, T. E., Jr. (1992). *Dignity and practical reason in Kant's moral theory*. Cornell University Press.
- Hsieh, C. T., & Urquiola, M. (2006). The effects of generalized school choice on achievement and stratification: Evidence from Chile's voucher program. *Journal of Public Economics*, 90(8-9), 1477-1503. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.11.002>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Kemendikbud.
- Lareau, A. (2011). *Unequal childhoods: Class, race, and family life* (2nd ed.). University of California Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son and Bourn.
- Musset, P. (2012). School choice and equity: Current policies in OECD countries and a literature review. *OECD Education Working Papers* No. 66. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5k9fq23507vc-en>
- Nguyen, T. D., & Springer, M. G. (2019). Market dynamics and reallocation following a school choice reform: Evidence from New Orleans. *Economics of Education Review*, 72, 49-69. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.05.006>
- Nusche, D., Halász, G., Looney, J., Santiago, P., & Shewbridge, C. (2011). *OECD reviews of evaluation and assessment in education: Sweden*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264116610-en>
- Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. *International Journal of Conflict Management*, 13(3), 206-235. <https://doi.org/10.1108/eb022874>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Reardon, S. F., & Owens, A. (2014). 60 years after Brown: Trends and consequences of school segregation. *Annual Review of Sociology*, 40, 199-218. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043152>
- Rest, J. R. (1986). *Moral development: Advances in research and theory*. Praeger Publishers.
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34-55. <https://doi.org/10.1086/260169>
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
- Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2009). *The ethics of teaching* (5th ed.). Teachers College Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Weinstein, J. M. (2002). The decline of the American teaching profession. *Stanford Law and Policy Review*, 13(1), 217-233.



- Whitty, G., Power, S., & Halpin, D. (1998). Devolution and choice in education: The school, the state and the market. Open University Press.
- Willms, J. D. (2010). School composition and contextual effects on student outcomes. *Teachers College Record*, 112(4), 1008-1037.
- Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton University Press.
- Zimmer, R., Gill, B., Booker, K., Lavertu, S., & Witte, J. (2012). Examining charter student achievement effects across seven states. *Economics of Education Review*, 31(2), 213-224. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2011.05.005>

